

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Rumah Susun dan Apartemen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan: Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara & Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat dan Permasalahannya*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Benny Bosu. 1997. *Perkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggungan dan Condominium)*. Mediatama Septakarya. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Effendy Perangin. 2005. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Erwin Kallo. 2009. *Panduan Hukum untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Kondominium, Apartemen dan Rusunami)*. Minerva Athena Pressindo. Jakarta.
- G.Kartasapoetra, et al. 1991. *Hukum Tanah: Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Imam Koeswahyono, Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini. 2004. *Hukum Rumah Susun: Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*. Bayumedia. Malang.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. 2012. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju. Bandung.
- Reko Dwi Saifutra. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Urip Santoso. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana Prenadamedia. Jakarta.
- Wantjik Saleh. 1982. *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

B. Jurnal:

- Anshori Ilyas, et al., "The Essence of Rights Protection Holders of Land Ownership Certificate." *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, Volume 25 No. 2 – 2020. page: 4-5.

Arini Nur Annisa, *et al.* "Government Supervision of The Rights Fulfillment of Housed Workers in The Transition Period." *Awang Long Law Review*, Volume 5 No. 1 – 2022. page: 262.

Kahar Lahae, Joshua Melvin Arung La'bi, Sri Susyanti Nur. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Tanah Tongkonan." *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Volume 16 Nomor 1 – 2021. hlm: 121.

Klaudius Ilkam Hulu. "Kekuatan Alat Bukti Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak." *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 1 Nomor 1 – 2021. hlm: 27.

Meita Djohan Oe. "Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah." *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 10 Nomor 1 – 2015. hlm: 62.

Muhammad Ilham Arisaputra, *et al.* "Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat." *Mimbar Hukum*, Volume 29 Nomor 2 – 2017. hlm: 277.

Muhammad Shafiyuddin Wafi dan Aminah. "Perolehan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Studi di Star Apartemen Kota Semarang)." *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 14 Nomor 1 – 2021. hlm: 444-451.

Rizky Aulia. "Kewenangan Badan Pertanahan Nasional di Bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang." *Jurnal Hima HAN*, Volume 4 Nomor 2 – 2017. hlm: 10.

Salsabila Putri Paramadani. "Perlindungan Hukum bagi Pembeli Rumah Susun Bukan Hunian (*non-hunian*) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 4 Nomor 1 – 2020. hlm: 18-33.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian ATR/BPN.

Surat Pejabat Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Republik Indonesia Nomor 750a/Hk.01.03/12/2014 tentang Fungsi Rumah Susun Bukan Hunian.